



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RENCANA KERJA
SATUAN PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
KECAMATAN PLANTUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL
Jl. Suratman No. 10 Plantungan Telp. (0294) 451006**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plantungan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, serta partisipasi aktif berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan pembangunan di wilayah Kecamatan Plantungan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Plantungan. Renja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2026.

Penyusunan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu-isu strategis wilayah, serta aspirasi

masyarakat yang dihimpun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Dokumen ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 dengan tema pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 yaitu “Bersinergi Membangun Kendal Semakin Maju dan Berdikari”. Tema tersebut menjadi pedoman dalam merumuskan arah pembangunan Kecamatan Plantungan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Plantungan.

Plantungan, 1 Oktober 2025

CAMAT PLANTUNGAN

M. MUCHOROBIN HS, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19820919 201101 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Plantungan.....	44
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja RKPD	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	61
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	62
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	73
3.3. Program dan Kegiatan	74
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	92
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	92
Bab V Penutup	118
Lampiran :	
1. SK TIM Renja 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa daerah sesuai kewenangannya wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terkoordinasi, sinergis, harmonis, transparan, responsif, efektif, efisien, terukur, akuntabel, berkeadilan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan.

Ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan tahunan yang berpedoman pada RKP serta program strategis nasional.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta proses atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Secara substansi, penyusunan perencanaan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta berpedoman pada konsep *money follows program*.

Rencana Kerja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk

menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 serta mengacu pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025. Dengan demikian, Renja Kecamatan Plantungan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Plantungan Tahun 2026.

Tema Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah **“Bersinergi Membangun Kendal Semakin Maju dan Berdikari.”** Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, penguatan kemandirian pangan, serta pemerataan infrastruktur wilayah. Isu strategis kabupaten seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, serta mitigasi risiko bencana menjadi bagian penting dalam perencanaan tahunan.

Kecamatan Plantungan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, berperan penting dalam mengintegrasikan proses perencanaan dari tingkat desa hingga kabupaten. Penyusunan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 dilaksanakan untuk:

1. Menjabarkan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang operasional sesuai tugas dan fungsi kecamatan.
2. Menjadi dasar penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Plantungan Tahun 2026.
3. Mengintegrasikan perencanaan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kabupaten.
4. Menangani isu strategis Kecamatan Plantungan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pengurangan

kerentanan bencana, serta peningkatan infrastruktur wilayah

Dengan demikian, Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang mampu memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kendal secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Plantungan Tahun 2026 adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan tahunan yang menjadi

dasar penyusunan program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Kecamatan Plantungan dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
2. Menjadi instrumen untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi, sinergitas, dan keterpaduan perencanaan antara desa, kecamatan, dan kabupaten dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Mempermudah proses evaluasi kinerja Kecamatan Plantungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara berkala.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Plantungan Tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan Renja PD, dasar hukum yang menjadi landasan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini berisi kajian terhadap pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta telaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan usulan program/kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta isu-isu strategis perangkat daerah. Bab ini juga berisi ringkasan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 beserta kebutuhan pendanaannya, termasuk pagu indikatif dan prakiraan maju.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Renja PD, termasuk kemungkinan penyesuaian apabila pagu anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan berkesinambungan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Plantungan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya menjadi bagian penting dalam penyusunan Renja, karena hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengukur kinerja, menetapkan prioritas, serta merumuskan perbaikan pada tahun perencanaan berikutnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja diukur melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Plantungan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang disampaikan melalui laporan kinerja secara periodik.

Sejalan dengan hal tersebut, Renja Kecamatan Plantungan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, capaian tahun berjalan 2025, serta perkiraan target dan kebutuhan pendanaan Tahun 2026. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kinerja perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Plantungan.

Memasuki tahun perencanaan 2026, pelaksanaan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada tahun tersebut telah direalisasikan dengan berbagai tingkat capaian. Untuk mengetahui keberhasilan, kendala, dan perbaikan yang diperlukan, dilakukan evaluasi

secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan rencana kerja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 agar lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Plantungan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja antara lain :
 - 1. Pagu Anggaran : Rp470.000,00,-
 - Realisasi Anggaran : Rp470.000,00,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 100 %
- 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen capaian keluaran Perencanaan Perangkat Daerah
- 3. Target capaian : 4 Dokumen kegiatan
- 4. Realisasi capaian : 4 Dokumen kegiatan
- 5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)
- 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja

7. Faktor Penghambat : -

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp119.800,00,-
Realisasi Anggaran : Rp119.800,00,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Capaian capaian keluaran Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Target capaian : 6 Laporan kegiatan
4. Realisasi capaian : 6 Laporan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : -

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp1.733.707.959,-
Realisasi Anggaran : Rp1.592.936.480,-
Realisasi Anggaran (%) : 91,88%
2. Indikator kinerja : Jumlah Orang yang capaian keluaran Menerima Gaji dan

- Tunjangan ASN
3. Target kegiatan : 16 Orang/Bulan
 4. Realisasi kegiatan : 16 Orang/Bulan
 5. Tingkat kinerja (%) : 100%
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : -

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp82.640.000,-
Realisasi Anggaran : **Rp82.640.000,-**
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Hasil
capaian keluaran Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
3. Target kegiatan : 12 Dokumen
4. Realisasi kegiatan : 12 Dokumen
5. Tingkat kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : -

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6
(enam) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp3.070.000,-
Realisasi Anggaran : Rp3.013.900,-
Realisasi Anggaran (%) : 98,17 %
2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Komponen
capaian keluaran Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 Paket
4. Realisasi capaian : 12 Paket
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanian
Kinerja
7. Faktor Penghambat : Harga di Toko tidak sesuai
dengan SSH yang ada
sehingga tidak bisa realisasi
anggaran 100%

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 53.505.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 53.500.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,99 %
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
capaian keluaran Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Kebutuhan anggaran setiap tahun menurun
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1. Pagu Anggaran : Rp11.210.400,-
Realisasi Anggaran : Rp7.992.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 71,30%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan
capaian keluaran Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
 3. Target capaian kegiatan : 12 Paket
 4. Realisasi capaian : 12 Paket
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Harga di Toko tidak sesuai dengan SSH yang ada sehingga tidak bisa realisasi anggaran 100%
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Pagu Anggaran : Rp6.842.000,-
Realisasi Anggaran : Rp6.251.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 91,37 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
capaian keluaran makan minum rapat
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Tidak ada sudah selesai
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1. Pagu Anggaran : Rp15.136.000,-
Realisasi Anggaran : Rp15.136.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 94,40%
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : -
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Pagu Anggaran : Rp191.145.000,-
Realisasi Anggaran : Rp191.145.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 92,93%
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan

kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : biaya perjalanan Dinas belum maksimal terealisasi, karena reefisiensi anggaran

4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp0,-
Realisasi Anggaran : Rp0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
2. Indikator kinerja : Jumlah Unit Peralatan dan capaian keluaran Mesin Lainnya yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 0 Unit
4. Realisasi capaian : 0 Unit
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Anggaran belanja modal dialihkan ke sub kegiatan lain menyesuaikan dengan kebutuhan.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Pagu Anggaran : Rp2.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp2.160.000,-

- Realisasi Anggaran (%) : 90%
- 2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan capaian keluaran Jasa Surat Menyurat
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
- 4. Realisasi capaian : 12 Laporan kegiatan
- 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
- 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
- 7. Faktor Penghambat : Tidak ada sudah selesai

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1. Pagu Anggaran : Rp26.709.000,-
Realisasi Anggaran : Rp22.967.521,-
Realisasi Anggaran (%) : 85,99%
- 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya capaian keluaran jasa telp, air, internet dan listrik
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
- 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
- 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
- 7. Faktor Penghambat : Realisasi Belanja Tagihan Telepon tidak maksimal karena telepon sudah jarang digunakan sehingga tagihanya sedikit

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Pagu Anggaran : Rp63.600.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp63.423.312,-
 Realisasi Anggaran (%) : 99,72%
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
 capaian keluaran honor tenaga penunjang
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
 kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
 (%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
 Jawab sesuai Perjanian
 Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Belanja ATK tidak 100%
 karena sudah tercover di
 sekretariat

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

1. Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Pagu Anggaran : Rp18.150.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp17.403.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 95,88 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah Kendaraan
 capaian keluaran Perorangan Dinas atau
 Kendaraan Dinas Jabatan
 yang Dipelihara dan
 dibayarkan Pajaknya
 3. Target capaian kegiatan : 15 Unit
 4. Realisasi capaian : 15 Unit
 kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : -

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Pagu Anggaran : Rp4.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp1.774.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 42,24 %
2. Indikator kinerja : Jumlah Kendaraan Dinas capaian keluaran Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
3. Target capaian kegiatan : 15 Unit
4. Realisasi capaian : 15 Unit
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Panyediaan pagu pajak kendaraan dinas tinggi, sedangkan realisasi pembayaran pajak lebih rendah dari indeks harga.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp17.892.040,-
Realisasi Anggaran : Rp17.719.400,-

- Realisasi Anggaran(%) : 99,04%
2. Indikator kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan capaian keluaran Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 3. Target capaian kegiatan : 3 unit
 4. Realisasi capaian : 3 unit kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : -

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Pagu Anggaran : Rp24.360.000,-
Realisasi Anggaran : Rp21.962.000,-
Realisasi Anggaran(%) : 90,16 %
2. Indikator kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana capaian keluaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
3. Target capaian kegiatan : 3 Unit
4. Realisasi capaian : 3 Unit kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : -

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 1. Pagu Anggaran : Rp7.140.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp6.880.000,-
 Realisasi Anggaran(%) : 96,36 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah Sarana dan capaian keluaran Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 3. Target capaian kegiatan : 2 unit
 4. Realisasi capaian : 2 unit kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : -

2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp202.400,-
 Realisasi Anggaran : Rp0,-
 Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Non keluaran Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
 3. Target capaian kegiatan : 3 Dokumen

4. Realisasi capaian kegiatan : 3 Dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Anggaran pada subkegiatan ini adalah belanja ATK dan sudah tercover di secretariat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp520.000,-
Realisasi Anggaran : Rp0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 3. Target capaian kegiatan : 6 Lembaga
 4. Realisasi capaian : 6 Lembaga kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Anggaran pada subkegiatan ini adalah belanja ATK dan sudah tercover di secretariat.

2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp9.978.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp7.078.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 70,94 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Sinkronisasi capaian keluaran Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 3. Target capaian kegiatan : 1 Dokumen
 4. Realisasi capaian : 1 Dokumen kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Kegiatan pada subkegiatan tersebut adalah pelaksanaan Kendal Expo, ada beberapa belanja yang yang tidak terserap yaitu sewa truk yang dibelanjakan 1 kali sewa.
3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp50.172.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp44.120.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 87,94 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Peningkatan capaian keluaran Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

- 3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Laporan kegiatan
- 5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)
- 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
- 7. Faktor Penghambat : Adanya kegiatan yang belum terealisasi sehingga anggaran tidak terealisasi 100%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah 2 kegiatan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1. Sinergitas Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 1. Pagu Anggaran : Rp7.074.800,-
 - Realisasi Anggaran : Rp6.000.000,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 84,81%
- 2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan capaian keluaran Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 3. Target capaian kegiatan : 2 Laporan
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 2 Laporan kegiatan
- 5. Tingkat Capaian Kinerja : 100% (%)
- 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
- 7. Faktor Penghambat : -

2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 1. Pagu Anggaran : Rp129.372.000,-
Realisasi Anggaran : Rp125.334.968,-
Realisasi Anggaran (%) : 96,88%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan capaian keluaran Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
 4. Realisasi capaian : 12 Laporan kegiatan
 5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)
 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
 7. Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan karena Honor tenaga linmas

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan antara lain:

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp16.854.800,-
Realisasi Anggaran : Rp16.800.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,67%
2. Indikator kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti capaian keluaran Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Target capaian kegiatan : 120 Orang
4. Realisasi capaian : 120 Orang kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 100% (%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Tidak ada sudah selesai

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp470.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp0,-
- Realisasi Anggaran (%) : 0%
- 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang
capaian keluaran Difasilitasi dalam rangka
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Dokumen
- 4. Realisasi capaian : 12 Dokumen
kegiatan
- 5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)
- 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
- 7. Faktor Penghambat : Belanja ATK sudah tercover di
sekretariat

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa, dengan Indikator Kinerja
antara lain :

- 1. Pagu Anggaran : Rp53.160.000,-
Realisasi Anggaran : Rp52.300.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 98,38%
- 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang
capaian keluaran Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset Desa
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Dokumen
- 4. Realisasi capaian : 12 Dokumen
kegiatan
- 5. Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)
- 6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanjian Kinerja
- 7. Faktor Penghambat : -

3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp0,-
Realisasi Anggaran : Rp0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Fasilitasi capaian keluaran dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3. Target capaian kegiatan : 0 Dokumen
4. Realisasi capaian : 0 Dokumen kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 0% (%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : -

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp400.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Fasilitasi capaian keluaran dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
3. Target capaian kegiatan : 12 Dokumen
4. Realisasi capaian : 12 Dokumen kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 100% (%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : -

5. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp Rp240.000,-
Realisasi Anggaran : Rp0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Fasilitasi
capaian keluaran dalam rangka Kerja Sama
Antar Desa dan Kerja Sama
Desa dengan Pihak Ketiga
3. Target capaian kegiatan : 12 Dokumen
4. Realisasi capaian : 12 Dokumen
kegiatan
5. Tingkat Capaian Kinerja : 0%
(%)
6. Faktor Pendukung : Komitmen dan Tanggung
Jawab sesuai Perjanian Kinerja
7. Faktor Penghambat : Belanja ATK sudah tercover di
sekretariat

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Plantungan Tahun 2024, dari alokasi anggaran sebesar Rp2.495.763.699,- terserap anggaran sebesar Rp2.309.971.391,- Realisasi Anggaran 92,56% keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp185.772.308,00 Silpa Terbanyak Pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Plantungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KECAMATAN PLANTUNGAN									
7.	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100%

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan	6	6	6	6	100	6	6	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	14	100%
7.01.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan	0	12	12	12	100	0	0	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	12	100	12	12	100%

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan								
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan barang mebel yang tersedia	10	10	0	0	0	5	5	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	15	15	0	0	0	5	5	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	12	12	100	12	100	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	15	15	100	15	15	100%

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	15	15	15	15	100	15	15	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan komputer, jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	0	0	12	0	12	12	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100	3	3	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100	3	3	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	100	2	2	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan penerbitan izin non usaha	12	12	3	3	100	12	12	100%

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	16	16	16	16	100	16	16	100%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1	1	1	100	1	1	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	16	16	16	100	16	16	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.04.2.01.01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2	2	2	100	12	12	100%

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan								
7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	120	120	120	100	120	120	100%

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes								
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	1	1	100%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	12	12	12	100	0	0	0
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0	12	12	12	100	0	0	0

2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sebagaimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Plantungan sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Capaian indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan Plantungan pada tahun 2024 sebesar 91,99 capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 88,18. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

2.2.2 Nilai SAKIP

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kecamatan Plantungan sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2021-2026 yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Plantungan pada tahun 2023 yang Evaluasi pada tahun 2024 sebesar 73,15 capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 63,5, Namun Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan

kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
 5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
 - 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Plantungan
Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	65	66,5	68	73,15	-	73,25	73,28	Nilai SAKIP Tahun 2023 dievaluasi di Tahun 2024
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	84,63	84,64	84,65	91,99	-	91,45	91,50	Nilai IKM semester II Tahun 2024

➤ **Analisis IKU Kecamatan Plantungan**

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

1. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
2. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
3. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas
4. Evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
2. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
3. Dokumen tidak disimpan dengan baik dan benar
4. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

1. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
2. Kemudahan akses terhadap layanan yang diberikan, termasuk lokasi dan waktu layanan.
3. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
4. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
2. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat

3. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.
4. Kesalahan dalam pengumpulan atau pencatatan data dapat menyebabkan hasil survei yang tidak akurat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Plantungan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plantungan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Plantungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Plantungan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Plantungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Plantungan sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
3. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
5. Disiplin aparatur yang belum optimal
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
7. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Plantungan adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perasngkat daerah

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Plantungan terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Kedaulatan Pangan
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Plantungan adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2026) tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Plantungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN PLANTUNGAN				2.102.973.529	KECAMATAN PLANTUNGAN				3.378.229.996	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.985.063.529	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.141.041.996	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				330.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	130.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	200.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	200.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.714.933.529	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.779.339.996	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Plantungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.714.933.529	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Plantungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.779.339.996	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	Sesuai SE Blm bisa pengadaan Pakaian Dinas di Tahun 2025
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	12.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				111.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				159.260.097	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.098.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.212.150	Ada Penyesuaian Pada Belanja Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.782.500	Ada Penambahan Belanja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.537.000	Ada Penambahan Belanja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.300.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.727.200	Ada Penambahan Belanja
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.903.247	Ada Penambahan Belanja

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				27.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Plantungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				156.850.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.400.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.250.000	Ada Penambahan Belanja
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.200.000	Ada Penambahan Belanja
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.241.903	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	14.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	19.680.000	Ada Penambahan Belanja

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	19.680.000	Ada Penambahan Belanja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6.241.903	Ada Pengurangan Belanja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	19.320.000	Ada Penambahan Belanja
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				120.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				120.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				120.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				120.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	120.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	120.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				16.060.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				82.058.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				16.060.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				56.298.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.120.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	6.678.000	Ada Penambahan Belanja

								Kerja Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	39.500.000	Ada Penambahan Belanja
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				25.760.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	25.760.000	Ada Penambahan Belanja
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				101.100.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				121.880.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.100.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26.480.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12 Laporan	6.720.000	

			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	19.760.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				95.400.000	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	95.400.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				120.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				28.060.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				120.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				28.060.000	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Plantungan	Jumlah Orang yang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	120.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Plantungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	27.760.000	
--	---	-------------------------	--	-----------	---------	--	-------------------------	---	-----------	------------	--

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	300.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				510.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5.070.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				510.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5.070.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	120.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	300.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	150.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	300.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	150.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Plantungan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	3.720.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	360.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Plantungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	240.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program/ kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis perangkat daerah. Serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut apabila ada, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan renja Kecamatan yang nantinya dibahas dalam forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang.

Dalam Menyusun Usulan Renja Kecamatan Plantungan tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2026.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kendal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUMEN	CATATAN
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah, Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

➤ Arah Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana pembangunan daerah disusun untuk mendukung pencapaian Kebijakan Nasional. Maka dalam penyusunannya tidak lepas dari prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Nasional Tahun 2026 yang terdapat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

➤ **Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan provinsi jawa tengah. Prioritas pembangunan provinsi jawa tengah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif serta inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

➤ **Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah adalah "Bersinergi Membangun Kendal Semakin Maju dan Berdikari". Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada "Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan", dan "Penguatan Kendal Berkarakter". Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, arah kebijakan Pembangunan juga memperhatikan Tahun 2025-2045 dengan prioritas pada “Penguatan Kendal Berkarakter” di periode pertama RPJPD (2025-2029). Arah kebijakan ini diprioritaskan pada :

1. Penguatan hilirisasi dan modernisasi sektor perekonomian, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata.
2. Penguatan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat keehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya.
3. Penguatan penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa. Meningkatkan pengelolaan sampah;
4. Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah.
5. Penguatan kualitas lingkungan hidup

Dengan melihat pada RPJMD, RPJPD periode pertama dan visi misi Kepala Daerah terpilih, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 ditekankan pada :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
2. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatkan kondusifitas wilayah;
4. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Meningkatkan reformasi birokrasi;
7. Meningkatkan reformasi birokrasi;
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah;
9. Meningkatkan sektor perekonomian daerah.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
 - a. Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keanekaragaman hayati
 - c. Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
 - d. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana; dan
 - e. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata.
 - a. Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan infrastruktur;
 - b. Mendorong infrastruktur layak anak, lansia dan difabel;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi;
 - d. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitas irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;
 - e. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah sesuai SPM;
 - f. Peningkatan penanganan Kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka

pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM;

- g. peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan peneggakan perda RTRW;
- h. Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;
- i. Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
- j. Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/distribusi channel;

3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam;

- a. peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal;
- b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata;
- c. meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian, peningkatan lahan pertanian serta meningkatkan kapasitas petani baik pertanian konvensional maupun penggunaan metode pertanian modern;

- d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan;
 - e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan izin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;
 - f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
 - g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
 - h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - i. peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;
4. Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep e-Government;
- a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;
 - b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN;

- c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi e- planning, e-monitoring, e- musrenbang, e- services, e-budgeting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;
 - d. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.
5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda;
 - c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca;
 - d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan jaminan Kesehatan untuk masyarakat, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB;
 - f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
 - g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG disemua perangkat daerah, peningkatan

perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

Di samping program prioritas di atas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan, akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah. Isu kemiskinan termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan arahan Presiden, ditargetkan menuju 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2026
Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia; Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah "Bersinergi Membangun Kendal Semakin Maju dan Berdikari". Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada "Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan", dan "Penguatan Kendal Berkarakter". Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif; Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan penyandang Disabilitas; Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri; Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	adaptif serta inklusif dan merata; Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.	pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, arah kebijakan Pembangunan juga memperhatikan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2026 dengan prioritas pada “Penguatan Kendal Berkarakter” di periode pertama RPJPD (2025-2029).	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
--	---	--	---

kemiskinan; Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			
---	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2026 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan, Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan sasaran program Kecamatan Plantungan tahun 2026 secara umum adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Secara Umum Tujuan dan Sasaran Kecamatan Plantungan Tahun 2026 diuraikan pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Plantungan Tahun 2026

TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET
			2026
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Persentase desa mandiri di Kecamatan	%	16,66
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Indeks	91,45
	Nilai SAKIP	Poin	73,25
Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah Desa Naik Strata	Desa	1

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam upaya mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode tahun 2025-2029, untuk perencanaan tahun ke-2 atau tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua tujuh) sub kegiatan.

a) **Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan** diantaranya adalah :

- a. Pencapaian visi misi Kepala Daerah
Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Plantungan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Plantungan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”. Kemudian dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi Kedua yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel, Inklusif”

Makna Misi kedua adalah mendorong tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif sehingga pelayanan publik lebih efektif dan masyarakat merasa terlayani dengan baik Adapun Peran Kecamatan Berdasarkan Visi Misi Bupati adalah :

1. Sebagai Penyelenggara Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel
 - Mengimplementasikan misi kedua Bupati: “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif”.
 - Menjadi ujung tombak pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berintegritas di tingkat wilayah.
 - Menjamin setiap proses administrasi dan layanan kecamatan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai Fasilitator dan Koordinator Pemerintahan Desa
 - Membina, mengawasi, dan mendampingi desa agar sejalan dengan arah pembangunan kabupaten.
 - Menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan desa dan masyarakat.
 - Menyinkronkan program kabupaten dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.
3. Sebagai Pelayanan Publik yang Inklusif dan Partisipatif
 - Memberikan layanan langsung kepada masyarakat dengan prinsip mudah, cepat, murah, transparan.

- Mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

4. Sebagai Pengendali, Pengawas, dan Evaluator Program Pembangunan

- Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan desa/kelurahan.
- Memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai target, efektif, serta tidak menimbulkan masalah tata kelola maupun sosial.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :
Jumlah program 6 (enam), jumlah kegiatan 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah subkegiatan 27 (dua tujuh) sub kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Plantungan sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Plantungan dan melingkupi semua desa 16 (enam belas) desa.
- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Perubahan atau ketidaksesuaian antara rumusan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD dapat terjadi karena beberapa pertimbangan dan dinamika dalam proses perencanaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Penyesuaian terhadap Kebijakan dan Prioritas Daerah Terbaru

Dalam proses penyusunan RKPD definitif, terdapat penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten, Forum Perangkat Daerah, serta arahan Kepala Daerah. Oleh karena itu, beberapa program/kegiatan mengalami perubahan atau pengalihan agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan tahun berjalan.

b. Perubahan Alokasi dan Kapasitas Fiskal Daerah

Perubahan pagu indikatif terjadi karena adanya penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, baik akibat efisiensi belanja, penurunan/kenaikan pendapatan daerah, maupun kebijakan transfer pusat dan provinsi. Hal ini mengakibatkan pergeseran pagu atau penyesuaian target kegiatan.

c. Sinkronisasi dengan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi

Beberapa program atau kegiatan mengalami perubahan karena harus diselaraskan dengan program prioritas nasional maupun provinsi yang baru ditetapkan, terutama pada urusan pemerintahan yang bersifat konkuren.

d. Perubahan Kondisi dan Kebutuhan Lapangan

Dalam proses perencanaan, ditemukan adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau infrastruktur di wilayah kerja yang memerlukan penyesuaian program/kegiatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.3 , yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Plantungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
					KECAMATAN PLANTUNGAN				3.378.229.996,00				4.709.640.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.378.229.996,00				4.709.640.000,00
7	01				KECAMATAN				3.378.229.996,00				4.709.640.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	3.141.041.996,00			-	3.141.041.996,00

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		10 Dokumen	350.000,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	630.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	4 Dokumen	350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		130.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	4 Laporan	200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun		12 Dokumen	2.779.339.996,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	3.350.000.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	34 Orang/bulan	2.779.339.996,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		3.350.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	0,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	23.000.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	34 Paket	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		23.000.000,00

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor		100 persen	159.260.097,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	289.200.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Paket	2.098.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		4.700.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Paket	5.212.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		23.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Paket	4.782.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		10.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Paket	4.537.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		12.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Paket	6.727.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		19.000.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	135.903.247,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		220.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	6 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		500.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang diadakan		100%	0,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	205.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	20 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		30.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	15 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		175.000.000,00

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		12 Laporan	56.850.000,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	317.400.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		2.400.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	27.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		27.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	127.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		288.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara		15 Unit	45.241.903,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	167.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	11 Unit	19.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		5.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	5 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		20.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	3 Unit	6.241.903,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		125.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	5 Unit	19.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		17.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kegiatan prioritas daerah lintas sektor yang diimplementasikan di kecamatan		100 Persen	120.000,00			-	120.000,00

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		3 Dokumen	120.000,00		Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	120.000,00
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha								
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	3 Dokumen	120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		120.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang undefined		80 Persen	82.058.000,00			-	111.120.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan		12 kali	82.058.000,00		Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa	-	111.120.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	4 Lembaga	10.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		10.120.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	1 Dokumen	6.678.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		10.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	39.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		90.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan		25.760.000,00		Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		1.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	25.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		1.000.000,00

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani		100 persen	121.880.000,00			-	175.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		6 laporan	26.480.000,00		Masyarakat Umum dan Kelompok, Toga, Tomas dan Perangkat Desa	-	55.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah laporan kegiatan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	6.720.000,00		Masyarakat Umum dan Kelompok, Toga, Tomas dan Perangkat Desa		15.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Laporan	19.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Toga, Tomas dan Perangkat Desa		40.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 kali	95.400.000,00		ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	120.000.000,00

7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
						Jumlah laporan kegiatan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	95.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		120.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase potensi kasus konflik sosial yang ditangani		100 Persen	28.060.000,00			-	70.500.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan		12 Laporan	28.060.000,00		Masyarakat Umum dan Kelompok, Toga, Tomas dan Perangkat Desa	-	70.500.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	120 Orang	27.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Toga, Tomas dan Perangkat Desa		70.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Kendal, Plantungan, Plantungan	12 Dokumen	300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Toga, Tomas dan Perangkat Desa		500.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase penyusunan APBDes tepat waktu/ persentase desa dengan tata kelola baik		100 Persen	5.070.000,00			-	670.000,00

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		12 Dokumen	5.070.000,00		Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa	-	670.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	3 Dokumen	300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		120.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	12 Dokumen	300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		150.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		100.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		12 Dokumen	3.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		100.000,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 Laporan	360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		100.000,00
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
					umlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		100.000,00
J U M L A H								3.378.229.996,00				4.709.640.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2026. Penyusunan Renja ini merupakan wujud perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 pembangunan Kabupaten Kendal menitik beratkan pada “Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Merata”. Sejalan dengan tema tersebut, Kecamatan Plantungan berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Plantungan Tahun 2026 diuraikan pada **Tabel 4.1** Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja program ini adalah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 6 (enam) kegiatan, 17 (tujuh belas) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp3.141.041.996,00.

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun” dengan target kinerja 10 dokumen, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp350.000,00

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000,00, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen;

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000,00, indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 4 laporan;

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun” dengan target kinerja 12 dokumen, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp2.779.339.996,00.

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.779.339.996,00
Indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 orang/bulan;

1.3. Adiministrasi Kepegeawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia” dengan target kinerja 0 Stel, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp0,00. belum dianggarkan karena terdapat larangan pengadaan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan SE. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud belum dapat dialokasikan pada tahun perencanaan.

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 34 Paket;

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Persentase hasil penyediaan administrasi umum perangkat daerah” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 7 (tujuh) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp159.260.097,00.

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.098.000,00 Indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket;

1.4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.212.150,00 Indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket;

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.782.500,00 Indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 12 paket;

1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.537.000,00 Indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket;

1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.727.200,00 Indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket;

- 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.903.247,00 Indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan;
- 1.4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 Indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 laporan;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang tersedia” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp0,00 belum dianggarkan karena keterbatasan pagu anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun perencanaan.
- 1.5.1 Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 Indikator kinerja Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit;
- 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 Indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah” dengan target kinerja 12 laporan, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp156.850.000,00.
- 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.400.000,00

Indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan;

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.250.000,00 Indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan;

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp127.200.000,00 Indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan;

1.7. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah barang milik daerah yang dipelihara” dengan target kinerja 15 unit, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp45.241.903,00.

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.680.000,00 Indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 11 unit;

1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 Indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 3 unit;

1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.241.903,00 Indikator kinerja Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor sebanyak 3 unit;

1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.320.000,00 Indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 5 unit;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja program ini adalah “Persentase pelayanan publik sesuai standar pelayanan” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp120.000,00.

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan” dengan target kinerja 3 Dokumen, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp120.000,00.

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000,00.

Indikator kinerja Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3 Dokumen;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja program ini adalah “Persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang” (100%) dan “Persentase kelembagaan kemasyarakatan yang dibina” (50%), terdiri atas 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp82.058.000,00.

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah koordinasi yang dilaksanakan” dengan target kinerja 12 kali terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dan anggaran sebesar Rp56.298.000,00

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000,- Indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 4 lembaga;

3.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp6.678.000,00 Indikator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebanyak 1 dokumen;

3.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.500.000,00 Indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja program ini adalah “Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dukungan anggaran Rp121.880.000,00.

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “jumlah koordinasi yang dilaksanakan” dengan target kinerja sejumlah 12 kali, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp26.480.000,00.

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.720.000,00 Indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 12 laporan;

4.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.760.000,00 Indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 12 laporan;

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah “jumlah koordinasi yang dilaksanakan” dengan target kinerja 12 kali, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp95.400.000,00.

4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.400.000,00 Indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja program ini adalah “Persentase potensi konflik sosial yang ditangani” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp28.060.000,00.

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan” dengan target kinerja sejumlah 12 Laporan, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp28.060.000,00.

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.760.000,00
Indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 120 orang;

5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000,00, Indikatr kinerja Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 12 Dokumen.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja program ini adalah “Persentase penyusunan APBDes tepat waktu dan desa dengan tata kelola baik” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, dukungan anggaran Rp5.070.000,00.

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa” dengan target kinerja sejumlah 12 (dua belas) Desa, terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp5.070.000,00.

6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000,00 Indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 3 dokumen;

6.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000,00 Indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen;

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000,00 Indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 1 Dokumen;

6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.720.000,00 Indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam

rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa sebanyak 12 Dokumen;

6.1.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp360.000,00
Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
sebanyak 1 Laporan;

6.1.6 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.000,00
Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
sebanyak 12 Laporan.

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PLANTUNGAN KAB. KENDAL
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah							
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						KECAMATAN PLANTUNGAN			3.378.229.996,00								4.709.640.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.378.229.996,00							4.709.640.000,00				
	7	01				KECAMATAN			3.378.229.996,00							4.709.640.000,00				
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 % 100.00 %	3.141.041.996,00						-	4.352.230.000,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	350.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	630.000,00				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	150.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		130.000,00				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	20 Dokumen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	23.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		23.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	159.260.097,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	289.200.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	200.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		500.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.779.339.996,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	3.350.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.779.339.996,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		3.350.000.000,00	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.098.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		4.700.000,00	KECAMATAN PLANTUNGAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.212.150,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		23.000.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.782.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		10.000.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.537.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		12.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.727.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		19.000.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.903.247,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		220.000.000,00	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	0,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		500.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemda yang tersedia	100 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	205.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		30.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		175.000.000,00	

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	156.850.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	317.400.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	2.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		2.400.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.250.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		27.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		288.000.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	15 Unit	45.241.903,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	167.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	19.680.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		5.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		20.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6.241.903,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		125.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	19.320.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan		17.000.000,00	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 %	120.000,00						-	120.000,00	

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	3 Dokumen	120.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	120.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10	120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	120.000,00	KECAMATAN PLANTUNGAN
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina	75 % 75 %	82.058.000,00						-	111.120.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12 Laporan	56.298.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa	-	110.120.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 0	10.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		10.120.000,00	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan												
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 0	6.678.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		10.000.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 0	39.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan potensi lokal dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		90.000.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	25.760.000,00	-		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa	-	1.000.000,00	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												

							Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	25.760.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		1.000.000,00	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	121.880.000,00						-	175.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	6 Laporan	26.480.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa	-	55.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 0	6.720.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa		15.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	19.760.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa		40.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	95.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan	ASN/ PNS Kecamatan Plantungan	-	120.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	00	95.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa			120.000.000,00	KECAMATAN PLANTUNGAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100 %	28.060.000,00						-	70.500.000,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	28.060.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa	-	70.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 0	27.760.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa		70.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	300.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kondusifitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa		500.000,00	

6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Presentase penyusunan APBDes tepat waktu/ persentase desa dengan tata kelola baik	100 % 100 %	5.070.000,00							-	670.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	5.070.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa	-	670.000,00			
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa			120.000,00			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa			150.000,00			
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	150.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa			100.000,00			
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	3.720.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa		100.000,00	
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	360.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa		100.000,00	
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	240.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa dan Perangkat Desa		100.000,00	
J U M L A H									3.378.229.996,00								4.709.640.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plantungan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2026. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan Kecamatan Plantungan dengan tujuan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu “Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, dan Makmur.”

Pelaksanaan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas pemberdayaan masyarakat desa, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan.

Untuk menjamin pelaksanaan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 berjalan optimal, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Setiap program dan kegiatan harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta disesuaikan dengan pagu indikatif dan prioritas kabupaten.

2. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor

Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kecamatan, perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan prioritas.

3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan Renja perlu didukung dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan ketercapaian target kinerja dan efektivitas anggaran.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan diharapkan berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Plantungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Plantungan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Plantungan ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026, dengan tujuan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi “Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, dan Makmur” melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 meliputi:

- 1) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, serta industri kreatif.
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

- 4) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana melalui pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 6) Penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 1 Oktober 2025

CAMAT PLANTUNGAN

M MUCHOROBIN HS, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19820919 201101 1 006



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :100.3.3.2/ 129 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim penyusun rencana kerja perangkat daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- 7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- 8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 11 April 2025

BUPATI KENDAL



DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/ 129 /2025

TANGGAL : 11 APRIL 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Plantungan	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Plantungan	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keseekretariatan	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Plantungan	Anggota	
5.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	1. Nur Azis; dan 2. Puji Hermawan, A.Md;
6.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	
7.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Farid Hidayatun Rosidah
8.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Teguh Kuncoro
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Pungki Nugraha, A.Md.
12.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum	
13.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Mukhlis Ali Fatoni.

BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
 - 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
 - 7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
 - 8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal
BUPATI KENDAL
DYAH KARTIKA PERMANASARI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Pungki Nugraha, A.Md.
12.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum	
13.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Mukhlis Ali Fatoni.



DYAH KARTIKA PERMANASARI